

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN PUPUK  
BERSUBSIDI DI DESA MATTIROWALIE KECAMATAN  
TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**



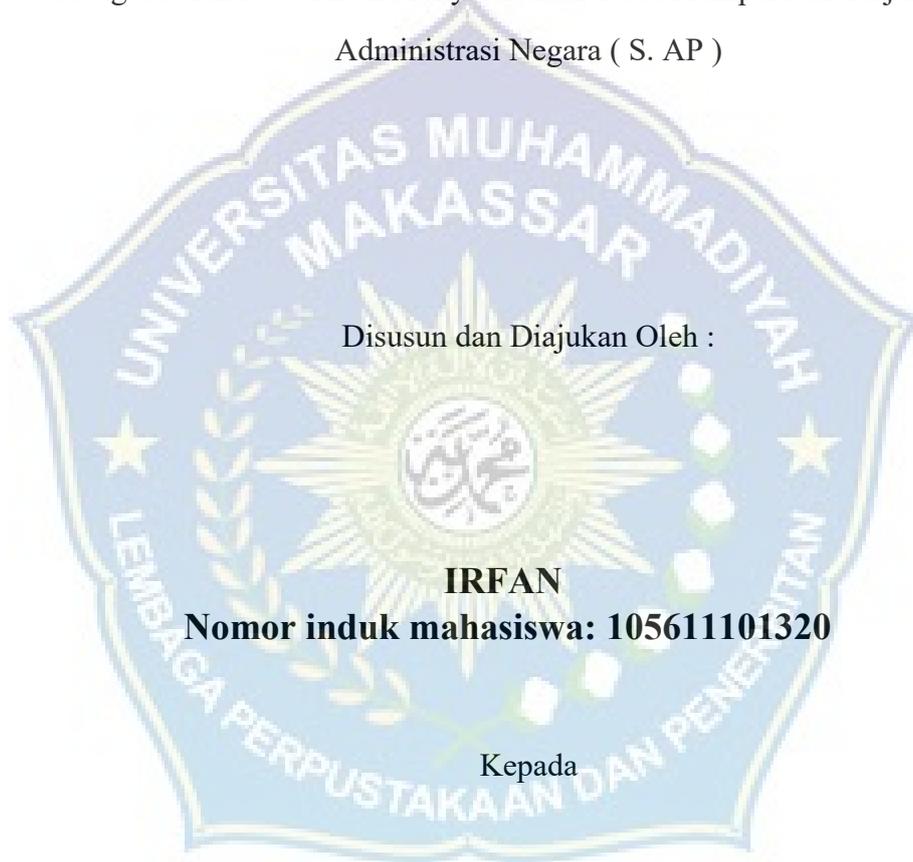
**IRFAN**  
**NIM:105611101320**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN PUPUK  
BERSUBSIDI DI DESA MATTIROWALIE KECAMATAN  
TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU**

Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaikan Studi Memperoleh Sarjana Ilmu  
Administrasi Negara ( S. AP )



Disusun dan Diajukan Oleh :

**IRFAN**

**Nomor induk mahasiswa: 105611101320**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

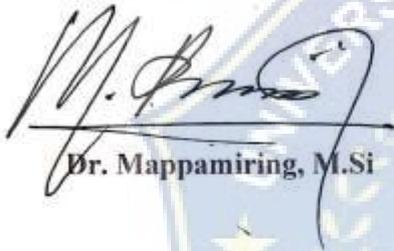
**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk  
Bersubsidi Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete  
Riaja Kabupaten Barru  
Nama Mahasiswa : IRFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611101320  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Mappamiring, M.Si**

Pembimbing II



**Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom**

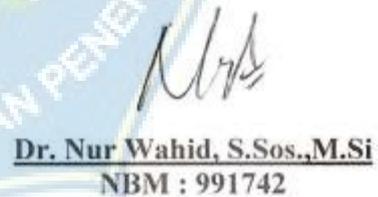
Mengetahui

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM : 730727

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara



**Dr. M. Ilyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM : 991742

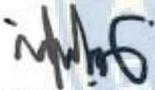
## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0311/FSP/A.4-II/X/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024.

Mengetahui :

Dekan

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730 727

  
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si  
NBM: 999 797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom

  
()  
()

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : IRFAN

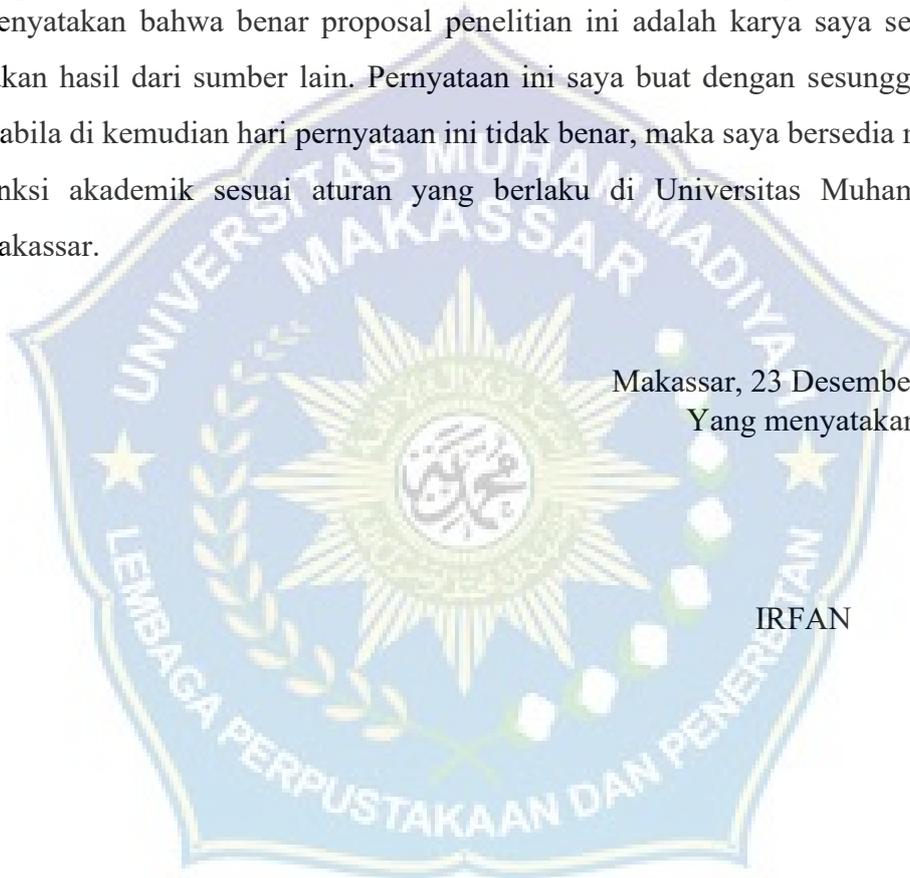
Nomor Induk Mahasiswa : 105611101320

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Desember 2023  
Yang menyatakan

IRFAN



## ABSTRAK

### **IRFAN. Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (dibimbing oleh Mappamiring dan Ahmad Syarif)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deksriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data berasal dari 8 informan yang ditetapkan dengan cara proporsional sampling, teknik pengabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sudah efektif dalam proses penerapannya Barru itu berjalan dengan cukup baik, dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah bagus. Dari segi komunikasi dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi itu dilakukan dengan cukup baik saat melakukan pendataan, dari segi sumber daya sudah sangat memadai sumber daya manusianya sangat kopeten dalam menjalankan tugas dan sumber daya non manusia berupa pupuk selalu tersedia tepat waktu, dari segi diposisi pelaksana kebijakan sudah menerima dan menjalankan tugas dengan baik, dan dari segi struktur birokrasi yaitu SOP.

**Kata Kunci:** *Implementasi, penyaluran, kebijakan*

## ABSTRACT

### **IRFAN. Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution Policy in Mattirowalie Village, Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency (supervised by Mappamiring and Ahmad Syarif).**

This study aims to determine how the Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution Policy in Mattirowalie Village, Tanete Riaja District, Barru Regency. This type of research uses qualitative methods with descriptive research types, data collection techniques through observation, interviews, and documentation, data sources come from 8 informants determined by proportional sampling, data validation techniques through source triangulation, technical triangulation, time triangulation while data analysis through data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.

Based on the results of the study, it shows that in general, the implementation of subsidized fertilizer distribution policies in Mattirowalie Village, Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency is effective in the implementation process, Barru is running quite well, in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure is good. In terms of communication in the subsidized fertilizer distribution policy, it is carried out quite well when collecting data, in terms of resources, it is very adequate, the human resources are very competent in carrying out their duties and non-human resources in the form of fertilizers are always available on time, in terms of the position of policy implementers, they have accepted and carried out their duties well, and in terms of bureaucratic structure, namely the SOP.

**Keywords:** Implementation, distribution, policy

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya allah milik SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Hanya dengan semangat dan motivasi membuat penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta adanya dukungan berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penulisan skripsi ini. Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Makmur dan Ibunda Nur Lina serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan sayang yang menjadi penyemangat luar biasa bagi penulis. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya: Bapak Dr. Mappamiring, M.Si dan Bapak Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik. 4
4. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Program Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan semangat. 5
5. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh informan yang ada di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam keperluan penelitian.
7. Saudara-saudara seperjuangan di kelas IAN A yang menjadi support system yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tenaga kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis tetap kembali kewacana yang telah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi
9. Kepada para sepupu yang selalu mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan, dan semoga karya skripsi ini menjadi bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 5 Oktober 2024

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Peneliti Terdahulu .....	9
B. Implementasi .....	11
C. Implementasi Kebijakan .....	16
D. Pengertian Pupuk .....	32
E. Pupuk Bersubsidi .....	33
F. Kerangka Pikir .....	38
G. Fokus Penelitian .....	40
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Informan Penelitian .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43

F. Teknik Analisis Data .....	44
G. Pengabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi obyek Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>95</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Jumlah Pupuk Masa Tanam 1 Dan Masa Tanam 2.....	60
Tabel 4.2 HET Masa Tanam I dan Masa Tanam II.....	61
Tabel 4.3 Jumlah Lahan Dan Jumlah Pupuk Setiap Dusun .....	62
Tabel 4.4 Jumlah kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani Perdesun .....	64



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir .....	39
Gambar 4.1 Peta Geografis Desa Mattirowalie.....	50
Gambar 4.2 Musyawarah Penyusunan Program Kebijakan.....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor penting dalam menunjang kebutuhan pangan. Pangan sendiri termasuk salah satu isu krusial dalam pembangunan di tingkat nasional dan global sebab pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijaga kualitas dan kuantitasnya jadi untuk menjaga semua itu kita harus memulai dengan membangun sector pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu sektor pembangunan yang penting untuk diperhatikan. Pembangunan pertanian yang diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak terlepas pada tujuan yang lainnya yaitu peningkatan produksi dan produktivitas petani. Salah satu dukungan pemerintah dalam penyediaan faktor input usaha tani adalah kemudahan akses penebusan subsidi pupuk bagi petani.

Dan juga pertanian merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kesejahteraan petani belum meningkat secara merata dibandingkan dengan pekerja di sektor industrialisasi dan perdagangan. Pemerintah sebagai badan utama penyelenggara negara memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan petani. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Peran sektor pertanian dapat dilihat secara lebih komprehensif, antara lain: (1) sebagai penyedia pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (food security), (2) sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa (3) sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, dan (5) sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui billing system di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui billing system masih ditemukan adanya kelemahan pada indikator tepat waktu terjadi keterlambatan waktu pengiriman pupuk bersubsidi. (Rahmaan, 2021)

Masalah pupuk di Indonesia selalu menjadi persoalan yang menyentuh langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelolah lahan. Oleh karena itu, ketika pupuk langka dan harganya mahal maka petani lah yang akan menjadi korban utamanya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk bagi petani. Dengan adanya keterbatasan Pemerintah dalam penyediaan subsidi pupuk dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi petani tanaman pangan, peternakan dan perkebunan rakyat.

Kesejahteraan petani tidak lepas dari 3 hal yaitu permasalahan pupuk, benih dan harga. Kecukupan pupuk bagi tanaman akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang baik sehingga produksi dan produktivitas dapat meningkat. Kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui kebijakan subsidi merupakan kebijakan pertanian yang mengalami berbagai transisi konseptual. Secara bertahap kebijakan pupuk subsidi diarahkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pendistribusiannya. Dan Masalah yang terjadi adalah keterlambatan dalam penyaluran dan juga kelangkaan pupuk bersubsidi, sementara satu minggu saja terlambat maka berpengaruh besar terhadap tanaman. Permasalahan lainnya adalah ketidakcukupan pembagian pupuk yang tidak sesuai dengan lahan yang di garap. Dan harga pupuk bersubsidi malah lebih tinggi dijual di kios-kios pupuk.

Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi petani yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani. Melalui kementerian pertanian (Kementan), pemerintah telah mengalokasikan subsidi pupuk untuk petani. Program ini dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sangat diperlukan adanya dukungan penyediaan pupuk yang memenuhi prinsip dari segi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Kelangsungan hidup dan kesejahteraan para petani tidak luput dari peran pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus bisa untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri melalui Surat Keputusan Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 februari 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk

sektor pertanian. Dan Kementrian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 130/Permentan/Sr.130/11/2015 Tahun Anggaran 2016.

Hasil penelitian penelitian, bahwa belum tercapainya tujuan dari kebijakan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat karena seringnya miss komunikasi.(Maharani, 2018)

Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti

unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman. dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah, sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

Jenis subsidi pupuk yang dijalankan selama ini adalah subsidi harga atau subsidi tidak langsung di mana alokasi pupuk subsidi yang telah diusulkan oleh pemda dan ditetapkan oleh pemerintah pusat itu dilanjutkan dengan pengiriman dari produsen yang ditugaskan kedistributor hingga pengecer, ke kelompok tani dan petani.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan tahun 2024 bahwa saat ini di pasar terdapat dua harga pupuk yaitu harga subsidi dan harga non subsidi dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi”, tujuan diterapkannya kebijakan ini yaitu guna mewujudkan distribusi yang lebih merata dan lebih mudah untuk petani, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran kepada petani yang memang berhak untuk menerimanya.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan 6T (enam tepat) yang meliputi Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.”yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka menyempurnakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi yang banyak menemukan kendala dilapangan, serta guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani maka pemerintah membuat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dan penyaluran pupuk bisa lebih merata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya di Tiyuh Margo Mulyo belum berjalan optimal dikarenakan pendistribusian masih belum

sepenuhnya menggunakan kartu petani berjaya, keterlambatan pengiriman pupuk dan kuota pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dirasa memberatkan petani. Adapun faktor penghambat implementasi adalah kekurangan sumber daya penyuluh pertanian lapangan, permasalahan teknis dan jaringan serta petani lansia yang sulit memahami penggunaan kartu petani berjaya. (Nabila, 2023)

Kabupaten Barru merupakan salah satu kawasan pertanian yang mempunyai lahan pertanian yang luas, hal ini menjadikan pemerintah Barru harus memperhatikan program dalam sektor pertanian yang berpihak bagi petani. Wilayah Barru yang terdiri dari tujuh Kecamatan lima belas Kalurahan dan empat puluh desa, salah satunya Desa Mattirowalie mempunyai lahan pertanian yang luasnya 2023 hektare, oleh karna itu pupuk sangat di butuhkan dan program pemerintah yaitu pupuk bessubsidi merupakan kebijakan yang sangat tepat tetapi kebijakan tersebut masih belum bisa berjalan dengan baik karna banyaknya masalah berupa penyaluran pupuk yang tidak merata, harga pupuk eceran yang mahal, dan pengambilan serta penggunaan pupuk secara berlebihan sehingga sebagian masyarakat tidak kebagian dan program kartu tani ini yang dibuat dan dikeluarkan kebijakan penggunaan kartu tani untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi yang diwajibkan bagi petani.

Akan tetapi setelah dilakukan percobaan menurut petani program kartu tani ini tidak begitu efektif dikarenakan banyak petani kurang mengerti bagaimana cara penggunaannya dan mereka menganggap bahwa penggunaan kartu tani sangat rumit.

Program ini di mulai pada bulan juni 2023 dengan para kelompok tani yang bertugas untuk mensosialisasikan sekaligus mendata masyarakat yang akan

menerima kartu tani, adapun jumlah kelompok tani yang ada di desa mattirowalie yaitu setiap dusun memiliki satu kelompok tani yang jumlah anggotanya berisi 25 sampai 50 anggota(Ketua Kelompok Tani).

Sebelum penggunaan kartu tani, masyarakat menggunakan KTP untuk menebus pupuk, akan tetapi masyarakat kembali menggunakan KTP untuk menebus pupuk karna menurut petani penggunaan KTP lebih mudah pembagian pupuk dengan cara ini, ternyata memiliki banyak kendala salah satunya adalah pembagian pupuk yang tidak merata, pembagian pupuk juga dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada waktu penanaman musim hujan dan musim kemarau. Menurut salah satu ketua kelompok tani pembagian pupuk kadang tidak mencukupi karena ada beberapa petani yang menambah lahan pertaniannya dan tidak melaporkan kepada kelompok tani.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penyaluran Pupuk Besubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mengangkat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktikal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dan manfaat terhadap kebijakan yang akan dibuat sehingga memahami faktor faktor apa saja yang mendukung maupun faktor yang dapat menghambat kebijakan program kartu tani dan juga agar dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan program kartu tani

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan agar setiap kebijakan yang di buat dapat lebih maksimal dan lebih bisa mensejahtrakan para petani.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Peneliti Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama penulis/ tahun/judul</b>	<b>Masalah</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1</b>	Brilliant Ar Rahmaan (2021) Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Billing System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)	Bagaimana Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Billing System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)?	Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui billing system di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada beberapa faktor penghambat seperti keterlambatan pengiriman
<b>2</b>	Noka Puspita Maharani (2018)	bagaimana implementasi kebijakan dan	Jenis penelitian termasuk dalam jenis penelitian	Hasil penelitian penelitian, bahwa belum tercapainya

	Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur	faktor penghambat penyediaan pupuk bersubsidi di wilayah jawa timur	deskriptif dengan pendekatan kualitatif	tujuan dari kebijakan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat karena seringkali miss komunikasi
3	Nabila (2023) Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal dikarenakan pendistribusian pupuk bersubsidi belum sepenuhnya menggunakan kartu tani berjaya dan beberapa faktor penghambat adalah kekurangan sumberdaya, kesalahan teknis dan jaringan serta petani lansia yang sulit memahami

Peneliti pertama berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi melalui billing system di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur

birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik meski masih memiliki kelemahan yaitu keterlambatan waktu pengiriman pupuk bersubsidi. Selanjutnya peneliti kedua berfokus pada belum tercapainya tujuan dari kebijakan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat karena seringnya miss komunikasi. Peneliti ketiga berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal dikarenakan pendistribusian pupuk bersubsidi belum sepenuhnya menggunakan kartu tani berjaya dan beberapa faktor penghambat adalah kekurangan sumberdaya, kesalahan teknis dan jaringan serta petani lansia yang sulit memahami. Dan penelitian yang akan saya lakukan yaitu berfokus pada bagaimana Implementasi Penyaluran Pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

## **B. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermula pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2002).

Menurut (Purwanto dan Sulistyastuti, 1991), Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan (Agustino, 2008).

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip (Solichin, 2008), mengatakan bahwa : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Bahwa dapat disimpulkan implementasi adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh sebuah objek berikutnya yakni kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel itu mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,

b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh : masyarakat di wilayah gunung Kidul lebih suka menerima program air bersih daripada menerima program kredit rumah,

c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,

Apakah letak sebuah program sudah tepat. Komponen lingkungan kebijakan mencakup :

a. Seberapa besar kekuasaan,

b. Kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,

c. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,

d. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yaitu: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik paling penting setidaknya dalam dua hal :

a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak

kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidaksepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

#### Implementasi Kebijakan

Teori George C.Edward, Edward III (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu :

- a. Komunikasi yakni keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target Group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial,

- c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.. ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif,
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau upaya tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh beberapa aspek yakni: alternatif, benar, kepuasan, kebutuhan, koordinasi, tepat waktu, hemat, pengambilan keputusan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta tanggungjawab. Implementasi kebijakan dirancang untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan publik, hal itu dilatarbelakangi agar bisa meminimalkan pemanfaatan sumber daya secara benar dan tepat (Meutia, 2017).

### **C. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan aturan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut (Winarno, 2016) menjelaskan secara luas implementasi kebijakan mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik pekerjaan bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi ini merupakan sebuah peraturan yang juga melibatkan aktor baik itu pemerintah maupun organisasi yang saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan dari suatu kebijakan.

Menurut Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Nurdin Usman, 2002) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sementara itu, (Setiawan, 2004) berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. (Subianto, 2020)

Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan mengenai implementasi kebijakan public dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaku administrasi untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan kebijakan dan

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Fokus utama dari kebijakan adalah di mana tujuan dan sasaran kebijakan telah tercapai, dan penjelasan yang menyebabkan tujuan atau sasaran kebijakan tercapai atau tidak.

### **1. Proses Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu kerangka pemikiran dalam proses implementasinya. Pada proses implementasi kebijakan dibutuhkan komponen-komponen dalam sistem implementasi kebijakan. Adapun komponen-komponen pada sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Selain itu, terdapat fokus keberhasilan Van Horn dan Van Meter (1975) serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983) dalam (Tresiana & Duadji, 2021). yang memahami dan menjelaskan permasalahan proses implementasi kebijakan menjadi dua kelompok, yaitu melalui pendekatan top-down dan bottom-up.

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja para peneliti yang menggunakan pendekatan top-down ialah memilih kebijakan yang akan dikaji mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan secara formal tercantum dan dokumen kebijakan, mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk

mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran yang baik (sesuai dengan Standart Operating Procedure yang ada), mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran, mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima analisis kemudian, diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan (Tresiana & Duadji, 2021).

Sedangkan pendekatan botton-up diperoleh dari hasil ketidakpuasan dan kritik berdasarkan pendekatan top-down. Padahal menurut para pengkritik pendekatan top-down, realistis implementasi kebijakan bisa menjadi kompleks dan tidak hanya berkepentingan dengan isu, efektivitas atau efisiensi implementasi kebijakan saja. Tetapi, karena ketidakpuasan dari beberapa peneliti maka teretuslah pendekatan yang disebut botton-up. Pendekatan botton-up merupakan pendekatan yang menggunakan logika berpikir dari „bawah“ ke „atas“ yakni pendekatan yang berawal dari keinginan masyarakat yang disalurkan pada pemerintah kemudian pemerintah membuat peraturan dengan kewenangan yang dimiliki melalui berbagai pertimbangan, menurut Parsons (Nurchayanto, 2016) model botton-up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus, Parsons juga mengatakan bahwa dalam model pendekatan botton-up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasan dalam penerapan kebijakan.

Dalam menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini, peneliti juga menggunakan pendekatan top-down didalam analisi implementasi kebijakan. hal ini dikarenakan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu petani berjaya ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang dilanjutkan ke bawah untuk dapat diimplementasikan ke masyarakat.

Pada proses implementasi kebijakan, program dikatakan berhasil jika pelaksanaanya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain, tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sedangkan, pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan (Samiri, 2019). Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses dan gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, namun hal tersebut nyatanya dapat terjadi sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai (Ramdhan & Ramdhan, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan proses implementasi kebijakan berdasarkan tatanan praktis dari Mulyadi yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar yang meliputi: (1) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; (3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; (4) Dampak keputusan; dan (5) Upaya perbaikan. (Mulyadi, 2015)

## **2. Model Implementasi Kebijakan Publik**

Model merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Menurut (Agustino, 2016) mengkategorikan beberapa model implementasi kebijakan publik. Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan implementasi kebijakan yaitu, pendekatan yang berpola dari atas kebawah (top down) dan pendekatan dari bawah keatas (bottom up). Implementasi kebijakan publik mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya, yaitu :

**a) Model Implementasi Kebijakan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Abdal, 2015). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan menimbulkan konflik di antara para agen implementasi;

- b. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources);
- c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
- d. Karakteristik agen pelaksana, yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program;
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan;
- f. Sikap/disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kongnisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;

dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni prioritas nilai yang dimiliki oleh implementor.

**b) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dikenal dengan istilah *Implementation as a Political and Administrative Process*, yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun rapi, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Grindle dalam (Agustino, 2016) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi dapat dilihat melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a. Kepentingan kelompok sasaran (interest of the target groups)

Indikator dalam model implementasi kebijakan Grindle ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam prosesnya akan

melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasinya, hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. Tipe manfaat yang dihasilkan (type of benefits) Dalam isi kebijakan (content of policy) telah dijelaskan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa tipe manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari sebuah kebijakan harus mampu diinterpretasikan, kemudian dikomunikasikan kepada para pelaksana sebagai ujung tombak implementasi kebijakan di lapangan dan kendala pada masyarakat sebagai target sasaran dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan pelaksana kebijakan dapat mengetahui manfaat apa yang akan mereka dapat dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap sebuah kebijakan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envision)

Target yang akan dicapai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai dari suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. Pelaksana program (program implementor) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber daya yang digunakan (resources committed)

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Sumber daya yang diperlukan adalah sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik atau peralatan.

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy) Lingkungan Kebijakan menurut Grindle juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran,

hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan memengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Lingkungan kebijakan yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (power, interest, and strategy of actor involved)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dari apa yang diharapkan.

- b. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristic)

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan (responsiveness and compliance)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

**c) Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III**

Menurut George C. Edwards III (Subarsono, 2013) ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), sikap (Dispositions atau Attitudes) dan struktur birokrasi (Bureaucratic structure). Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut

George C. Edwards III sebagai berikut :

**1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok, sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran

dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat tidak jelas spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

## 2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya

tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program, untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran keberhasilan program.

#### 4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Variabel-variabel kebijakan berkaitan dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

Beberapa ahli menempatkan tahanan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

#### **D. Pengertian Pupuk**

Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada tumbuhan agar berkembang dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik ataupun non-organik. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut, agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan melalui tanah atau disemprotkan ke daun. Dalam arti luas yang dimaksud pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman. Menurut

Menurut Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman,

Sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme. Pupuk juga dapat diartikan sebagai bahan alami atau buatan yang mengandung unsur-unsur kimia yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pupuk dapat meningkatkan kesuburan alami tanah atau mengganti unsur-unsur kimia yang sebelumnya yang diambil dari tanah oleh tanaman. Dalam kandungan pupuk memiliki satu atau lebih dari tiga unsur penting atau unsur primer dalam nutrisi tanaman yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sekunder yaitu sulfur, magnesium dan kalsium.

Komponen utama dalam pupuk adalah nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman menggunakan nitrogen dalam proses sintesis protein, asam nukleat dan hormon. Ketika tanaman kekurangan nitrogen pertumbuhan tanaman akan terganggu yang biasanya ditandai dengan menguningnya daun. Tanaman juga membutuhkan fosfor, komponen asam nukleat, fosfolipid, dan beberapa protein. Unsur-unsur tersebut juga diperlukan untuk menyediakan energi untuk mendorong reaksi kimia metabolisme. (Ikbal, 2017)

#### **E. Pupuk Bersubsidi**

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia sudah mulai diterapkan yakni sejak tahun 1970 an. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah kepada petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui teknologi pemupukan. Selain itu, kebijakan pupuk bersubsidi juga sebagai upaya peningkatan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan. Agar kebijakan pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara 6 (enam) tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat, maka pemerintah perlu mengatur mekanisme penyaluran dan pendistribusian .

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin ketersediaanya dan harganya sesuai harga eceran tertinggi (HET) pupuk.

Peraturan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan alokasi pupuk di masing-masing daerahnya, untuk selanjutnya aturan tersebut menjadi pedoman bagi produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik. Namun, dengan adanya pembaharuan kebijakan Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian, jenis pupuk yang mendapatkan subsidi hanya Urea dan NPK.

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian setempat. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran

pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan HET sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi secara tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.
2. Memberikan pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien bagi PT. Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya/Produsen, Distributor, dan Pengecer untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani/Petan
3. Menanamkan persepsi bahwa pupuk bersubsidi bukan komoditi yang bebas diperdagangkan, sehingga dapat menghindari pola pikir pelaku usaha yang memperlakukan pupuk bersubsidi sebagai komoditi untuk mencari keuntungan belaka tanpa memikirkan kebutuhan pupuk untuk Kelompok Tani/Petani.
4. Menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi ke sektor yang tidak sesuai peruntukannya.

Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia secara historis mengalami beberapa kali perubahan. Pada periode 1970-1993, sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi harga dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN

Pada periode ini, pupuk yang disubsidi adalah harga pupuk yang berasal dari impor dan pupuk produksi dalam negeri. Periode 1999-2001 dikarenakan pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, maka subsidi harga pupuk dicabut dan sistem

subsidi harga diganti menjadi subsidi harga bahan baku untuk pembuatan pupuk yakni subsidi gas. Pada Periode 2003- 2005, sistem subsidi yang berlaku merupakan kombinasi subsidi gas dan subsidi harga. Pemberian subsidi gas diperuntukkan bagi pupuk Urea, sementara subsidi harga untuk pupuk non urea. Sedangkan pada periode 2006 hingga saat ini, subsidi yang berlaku adalah subsidi harga, yang dihitung dengan formula, selisih antara HET dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya produksi dikalikan volume produksi yang merupakan angka subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dengan sumber subsidi berasal dari APBN. Saat,

Saat ini, pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi system distribusi pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota). Mekanisme pembagian kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV.
2. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per propinsi serta pengaturan sistim Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani (RDKK).
3. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten
4. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara

nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam). Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer. Peraturan pupuk bersubsidi untuk kabupaten Pinrang diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 4 Tahun 2012.

Peraturan ini membahas tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian dan perikanan. Selain itu peraturan ini juga membahas tentang pengertian istilah-istilah yang terkait dengan subsidi pupuk

Menurut peraturan ini pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh distributor.

Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi sektor pertanian atau sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang. Sasaran

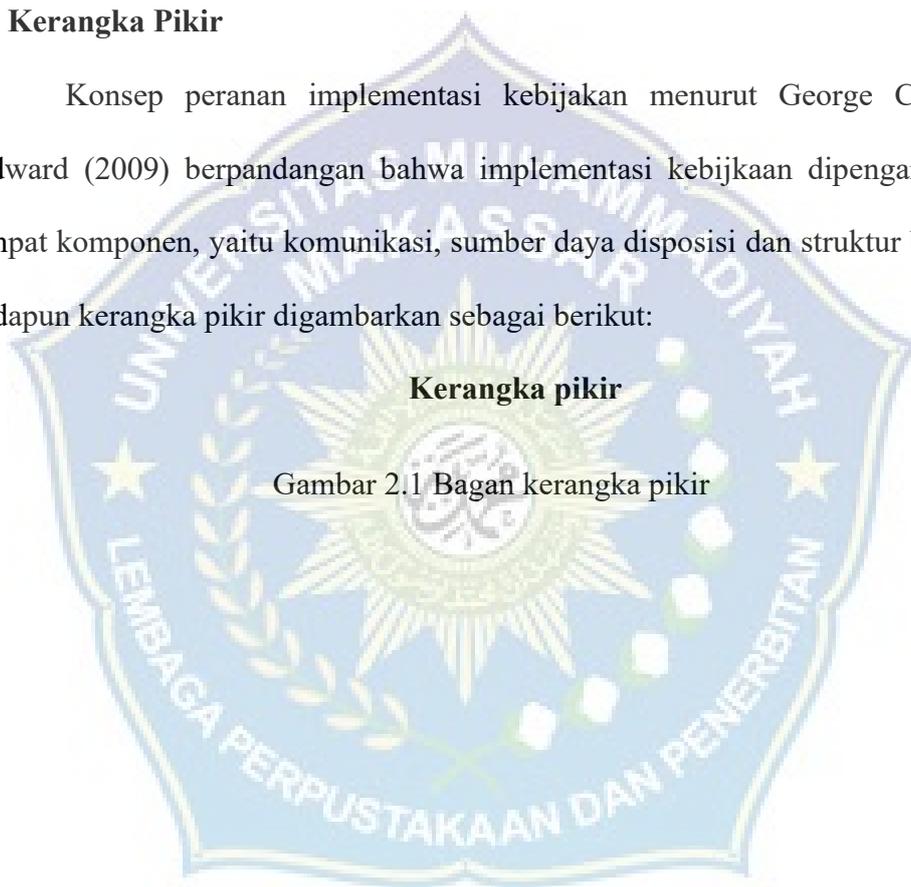
Sasaran pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 hektar. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

### **E. Kerangka Pikir**

Konsep peranan implementasi kebijakan menurut George C.Edward, Edward (2009) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu komunikasi, sumber daya disposisi dan struktur birokrasi. Adapun kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:

#### **Kerangka pikir**

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir



**Program Kartu Tani di Desa  
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja  
Kabupaten Barru**

**Distribusi Pupuk  
Bersubsidi**

**Implementasi Kebijakan  
(GeorgeEdward 2009)**

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

**Implementasi Kebijakan Penyaluran  
Pupuk Bersubsidi Yang Merata Kepada  
Seluruh Petani**

## **F. Fokus penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yang merata kepada seluruh petani dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C.Edward

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C.Edward yaitu:

- a. Komunikasi berupa penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang penyaluran pupuk bersubsidi yang disampaikan kepada kelompok tani di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
- b. Sumber daya berupa sumber daya manusia yaitu pelaksana kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dan sumber daya non manusia berupa pupuk bersubsidi yang akan di bagikan secara merata kepada petani di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
- c. Disposisi berupa bagaimana respon pelaksana kebijakann terhadap tujuan dari kebijakan agar pembagian pupuk bersubsidi menjadi merata kepada petani di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
- d. Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kelompok tani dan petani yang melaksanakan kebijakan tersebut, penyaluran pupuk secara merata sebagai tujuan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan di lakukan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan Waktu penelitian di lakukan pada tanggal 26 Juli-24 September 2024.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018). di mana data yang di dapatkan berupa bentuk informasi melalui tulisan ataupun informasi dalam bentuk lisan.

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2018). dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana implementasi kebijakan kartu tani berjalan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama peneliti melaksanakan penelitiannya sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2018).

#### **1. Data Primer**

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya adalah informan yaitu orang-orang yang kita jadikan sebagai objek penelitian satu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapat informasi atau data.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder ini adalah data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode sampling purposive atau purposeful sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan didasarkan pada kesamaan antara ciri-ciri yang dimiliki oleh subyek penelitian dengan tujuan penelitian (Herdiansyah, 2010). Oleh karena itu, terkait penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Drs. H. Alimuddin	AM	Kepala Desa
2	Alimuddin, SP	AL	Kepala BPP
3	Hasbullah Hanan	HH	Pimpinan Kios Lumut Belantara
4	Bakri	BK	Ketua Kelompok Tani
5	Sapuddin Supu	SS	Ketua Kelompok Tani
6	Syamsuddin	SM	Ketua Kelompok Tani
7	Ammas	AM	Ketua Kelompok Tani
8	Sapruddin	SP	Petani

Sumber : Dolah oleh peneliti, 2024

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah Teknik yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono, 2018)

##### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan harus menggunakan catatan tak terstruktur dalam tahap pertama yang terbuka, dalam tahap kedua memberikan perhatian pada sejumlah kategori terpilih.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa hasil gambaran atau suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencatat data yang sudah ada. Pengambilan data akan dilakukan di kantor desa pos kelompok tani

### 3. Wawancara

Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di susun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang di cari. Wawancara akan di laksanakan dengan kepala desa, ketua kelompok tani dan para petani yang ada di desa mattirowalie

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (Ghony dan Almanshur, 2016). Adapun langkah yang peneliti akan gunakan dalam menganalisis data yang sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data yang benar-benar di butuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang di peroleh dari lokasi penelitian atau data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data yang telah di peroleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian ini di pilih antara nama yang dibutuhkan dengan yang tidak lalu di kelompokkan kemudian di berikan batasan masalah.

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang di lakukan selama penelitian berlangsung.

## G. Pengabsahan Data

Triangulasi adalah metodeologis pada penelitian kualitatif yang harus peneliti ketahui. Teknik triangulasi bertujuan meningkatkan kekuatan teoritis, metodeologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi di bagi menjadi tiga yaitu berdasarkan pada sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat diperoleh dengan cara pengecekan data dari berbagai sumber yang telah di peroleh. Dalam hal ini peneliti dapat membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Perbandingan hasil wawancara dari informan (Data primer) dengan buku

atau file ataupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian (Data Sekunder).

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang di peroleh dengan teknik wawancara dilakukan pengecekan dengan teknik observasi ataupun dokumen.

## 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering digunakan mempengaruhi data. Untuk mendapatkan data yang lebih valid peneliti dapat melakukan pengecekan atau pengamatan tidak hanya satu kali dengan berbagai cara. Dalam hal ini peneliti bisa melakukan pengamatan pada saat di pagi hari saat informan masih dalam keadaan kuat. Kemudian melakukan pengamatan kembali pada sore hari untuk mendapatkan data yang lebih valid dan memastikan data yang di peroleh tidak berbeda dari waktu ke waktu

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Mattirowalie

Pada Awalnya Desa Mattirowalie berasal dari Pemekaran Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Kemudian pada tahun 1994 dibentuk Desa Persiapan Mattirowalie yang dipimpin oleh Kepala Desa dari Staf Kecamatan Tanete Riaja bernama M. Aris, kemudian pada tahun 1995 menjadi desa Devinitif dan jabatan Kepala Desa tetap dilanjutkan oleh M. Aris, kemudian Pada tahun 1999 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya dan terpilih M. Aris yang merupakan Pelaksana Tugas Kepala Desa pada saat itu.

Desa Mattirowalie terbentuk karena dianggap perlu adanya pemekaran Desa disebabkan Kelurahan Lompo Riaja pada saat itu memiliki jangkauan wilayah terlalu luas sehingga tata kelola Pemerintahan, Pembangunan dan pengawasan Pemerintah Kelurahan sulit terjangkau, awalnya dibentuklah Persiapan Pemekaran Desa dengan menamakan Desa Persiapan Mattirowalie, setelah menjadi Desa Devinitif dinamakanlah Desa Mattirowalie, dikatakan Desa Mattirowalie karena awalnya desa ini berada di tengah-tengah antara daratan dan penguungan dan memiliki lima Dusun yaitu Dusun Parenring, Cinekko, Bua, Limpo dan Dusun Tille jadi arti dari kata Mattirowalie mempunyai Arti / Makna yaitu:

1. Mattiro berasal dari kata Melihat.
2. Walie mempunyai arti kata segala penjur.

Adapun Luas Wilayah Desa Mattirowalie adalah 20,23 KM<sup>2</sup> / 2023Ha Dengan

Batas Wilayah Yaitu:

- Sebelah Utara : Kelurahan Lompo Riaja  
 Sebelah Selatan : Kelurahan Mattappawalie  
 Sebelah Timur : Desa Bacu bacu  
 Sebelah Barat : Desa Kading

Untuk lebih jelasnya berikut silsilah Kepala Desa yang pernah memimpin desa Mattirowalie dari jaman dahulu sampai saat ini:

1. M. ARIS Periode Tahun 1994-1999 (Devinitif)
2. M. ARIS Periode Tahun 1999-2008 (Devinitif)
3. BAKRI Periode Tahun 2008-2014 (Devinitif)
4. H. MUSTAKIM.P, S.Sos Tahun 2014-2015 (Pejabat)
5. Dra. Hj. I CALLI Periode Tahun 2015-2017 (Pejabat)
6. HAMZAH Periode Tahun 2017-2023 (Devinitif)
7. Drs. H. ALIMUDDIN Periode 2023-2029 (Devinitif)

Wilayah Desa Mattirowalie terangkum dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja, Pada tahun 1994,

## **2. Keadaan Geografis Desa Mattirowalie**

### **a. Letak geografis**

Desa Mattirowalie merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang berjarak 25 km dari pusat kota Barru (ibu kota kabupaten Barru)

Desa Mattirowalie terdiri dari 6 Dusun, 15 RT, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Dengan batas wilayah Sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, Berbatasan dengan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja
  2. Sebelah Timur, Berbatasan dengan Desa Bacu bacu Kecamatan Pujananting
  3. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting
  4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja
- b. Luas wilayah

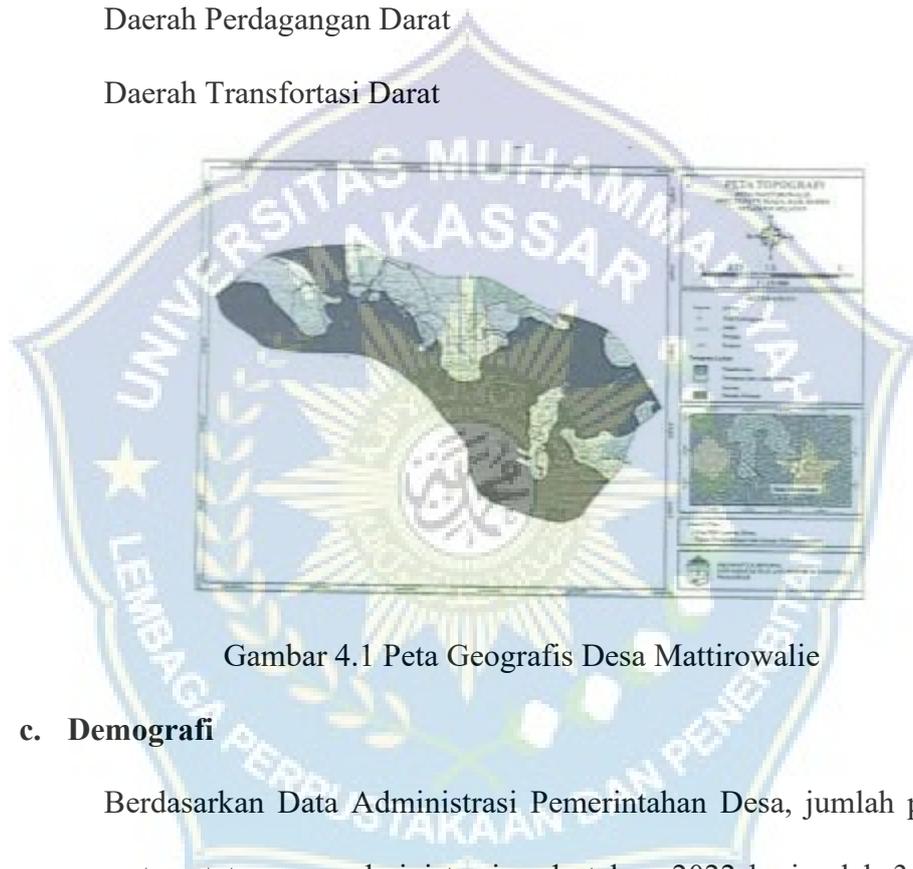
Luas wilayah Desa Mattirowalie adalah 2023 Ha/M2 atau 20,23 km<sup>2</sup> dengan Koordinat bujur: 119.70311 LS/LU dan Koordinat Lintang: - 4.580013 BT/BB, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun. Letak Desa Mattirowalie sangat strategis karena berada di jalan Kecamatan penghubung antara Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Tanete Riaja dan jalan utama menuju Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan penghubung menuju Kabupaten Bone dan Kabupaten Pangkep. Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya penduduk yang mata pencahariannya adalah berdagang. Tofografi Desa Mattirowalie berada

pada Ketinggian Diatas Permukaan Laut 734 Meter merupakan daerah dataran rendah dan dataran tinggi dengan kondisi Tanah Sawah dan Pengunungan yang dominan adalah tanah sawah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Mattirowalie sebagai:

Daerah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Daerah Perdagangan Darat

Daerah Transfortasi Darat



Gambar 4.1 Peta Geografis Desa Mattirowalie

#### c. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah 3.882 jiwa tersebar di 6 Dusun. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 1.919 jiwa dan perempuan sebanyak 1.963.Jiwa

#### d. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dari tingkat perekonomian pada khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mengdongkrak tingkat

kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru dan sebagaimana peraturan Bupati Barru No 21 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa jadi diperlukan perangkat desa yang mumpuni dan pastinya memiliki Pendidikan yang baik.

**e. Perekonomian**

Secara umum kondisi perekonomian desa Mattirowalie di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : TNI/POLRI/PNS, Guru Swasta, Guru Honorer, Karyawan Swasta, Wirausaha, Pensiunan, Tukang Kayu, Petani, Pedagang, Tukang Batu dan lain-lain.

**f. Kesehatan**

Kualitas kesehatan sangat menentukan kualitas dan angka harapan hidup penduduk, semakin sehat suatu desa maka angka harapan hidup tinggi, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maka yang penting di lihat sejauh mana pemerintah memperhatikan sector ini yakni dengan melihat sedekat apa fasilitas kesehatan, seberapa bagus kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan yang di lakukan tenaga medis juga sejauh mana kualitas SDM pelaku dan tenaga medis yang di miliki oleh sebuah desa di

desa Mattirowalie memiliki satu puskesmas dan jarak rumah sakit juga tidak terlalu jauh dari desa.

**g. Keagamaan**

Di lihat dari penduduknya, desa Mattirowalie mempunyai penduduk yang beragama islam dan. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat di lihat dari setiap dusun memiliki setidaknya satu mesjit adajuga mushola.

**h. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana Desa menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat dan sebagai faktor penunjang kemajuan Desa. Di Desa Mattirowalie sendiri sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana Desa Mattirowalie mulai dari Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, dan sarana prasaran umum lainnya yang sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat

**i. Kawasan Pertanian**

Desa Mattirowalie merupakan salah satu wilayah yang penyedia padi di kabupaten Barru dengan luas wilayah pertanian 430 Ha bukan cuma padi yang dihasilkan ada beberapa jenis tanaman yang dihasilkan di desa Mattirowalie antra lain : jagung, kacang tanah, ubi kayu,dan ubi jalar dan waktu tanamnya itu selang seling seusai musim dan cuaca .

## **B. Hasil Penelitian**

Penyaluran pupuk bersubsidi merupakan proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen kepada petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir yang.

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Beberapa tujuan pemberian subsidi pupuk kepada petani, yaitu: Mengurangi beban petani, Mentransfer teknologi kepada petani untuk menggunakan benih unggul, Memastikan pemupukan berimbang dengan harga terjangkau, Meningkatkan produksi dan produktivitas.

### **1. Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara untuk suatu kebijakan bisa mencapai tujuan. Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam proses kebijakan” (hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk sebuah kebijakan bisa mencapai tujuan. Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang

Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan memiliki kaitan dengan beberapa program yang diarahkan untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari program, dimana eksekutif mengatur bagaimana pelepasannya dan sumberdaya yang di gunakan agar bisa menjadi efektif dan efisien, dengan membuat petunjuk yang mudah dimengerti”(hasil wawancara dengan bapak AL 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan memiliki kaitan dengan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program dimana ada eksekutif atau seseorang untuk mengatur bagaimana cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Pimpinan Kios Lumut Blantara merupakan distributor di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan merupakan suatu program yang terjadi atau terbentuk setelah di tetapkannya suatu peraturan perundang-undangan dan memberikan kewenangan kepada suatu kebijakan dan memiliki output yang jelas, dengan demikian implementasi kebijakan menjadi mata rantai untuk mencapai tujuan”(hasil wawancara dengan bapak HH 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu program yang terbentuk setelah ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan dengan memberikan kewenang kepada kebijakan agar dapat menjadi mata rantai yang mengikat untuk mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ketua Kelompok Tani Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang Implementasi

Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan ini merupakan suatu program pemerintah yang memiliki tujuan yang memang di butuhkan oleh petani terutama untuk petani yang menjadikan pertanian sebagai matah pencarian satu-satunya”(hasil wawancara dengan bapak BK 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan program yang memiliki tujuan yang di butuhkan oleh petani terutama untuk petani yang menjadikan pertanian sebagai satu-satunya sumber matah mencahrian.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Petani dan selaku masyarakat Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Implementasi kebijakan merupakan program yang di buat untuk memudahkan dan membantu bagi petani dalam pengambilan pupuk dan sekaligus bisa membuat hasil memiliki presentase yang besar dalam keberhasilan panen”(hasil wawancara dengan bapak SS 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah program yang di buat untuk kesehjahteraan petani dengan cara membantu memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk subsidi.

#### **a. Komunikasi**

Dalam berbagai kasus, implementasi suatu program terkadang diperlukan didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain untuk mencapai tujuan dan keberhasilan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada Kepala Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang komunikasi penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi antra petani ke ketua kelompok tani dan ketua kelompok tani ke distributor itu sudah baik karena jarang terjadinya miss komunikasi oleh karna itu penyaluran pupuk itu sudah baik sekali”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa komunikasi antara pelaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi sudah baik sekali karna jarang nya atau sedikit nya kesalahan atau miss komunikasi yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang komunikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi sudah sangat baik dikarnakan dalam rangka penyusunan proram diadakannya pertemuan berupa musyawarah dengan pemerintah desa dan kelompok tani”(hasil wawancara dengan bapak AL 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dalam hal komunikasi sudah sangat baik di karnakan dalam rangka penyusunan program pasti diadakan pertemuan berupa musyawarah dengan pemerintah desa dan kelompok tani .

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Pimpinan Kios Lumut Blantara merupakan distributor di Desa Mattirowalie Kecamatan

Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang komunikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi dengan kelompok tani itu sudah baik dalam pendataan petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan luas lahan yang di kerjakan meskipun masih ada beberapa petani yang terlambat dalam pendataan seperti penambahan lahan yang di kerjakan sehingga terjadi kekurangan setelah pupuk di bagikan”(hasil wawancara dengan bapak HH 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara distributor dan konsumen akhir yaitu petani sudah baik dalam pendataan meskipun masi ada beberapa petani yang terlambat dalam pendataan sehingga pupuk yang di dapat tidak sesuai dengan lahan yang di garap.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua Kelompok Tani di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang komunikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi memang merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu program jika ada kekurangan atau kesalahan maka komunikasi adalah solusinya, jika ada dari anggota kelompok tani yang tidak mampu membayar untuk menebus pupuk maka ketua kelompok tani membayarkan terlebih dahulu untuk membantu dan akan di ganti setelah waktu panen tiba jadi komunikasi itu penting untuk mencapai tujuan”(hasil wawancara dengan bapak BK 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa komunika mmegang merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah

program kebijakan agar mampum memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kekurangan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Petani atau masyarakat Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang komunikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Komunikasi dalam program ini sangat baik karena dalam pendataan mudah dilakukan dikarenakan arahan oleh ketua kelompok tani dan saat pengumpulan berkas di wakili oleh ketu kelompok tani”(hasil wawancara dengan bapak SS 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam program ini sudah sangat baik karna proses pendataanya mudah dan di arahkan oleh ketua kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AM, AL, HH, BK, dan SS tentang komuniksai penyaluran pupuk subsidi itu sudah bagus baik dalam baik dalam rangka penusunan program kebijakan, pendataan dan komunikasi antara pelaku yang termasuk dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi.



Gambar 4.2 Musyawarah Penyusunan Program Kebijakan, 29 Agustus 2024

Berdasarkan gambar di atas dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru telah dilakukan dengan baik dengan diadakannya musyawarah dalam rangka penyusunan program kebijakan dengan meminta pendapat kepada kelompok tani atau masyarakat secara langsung.

#### **b. Sumber Daya**

Dalam suatu kebijakan perlu didukung dengan sumber daya agar kebijakan bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang sumber daya penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Sumber saya manusia di Desa Mattirowalie sudah cukup dan sangat baik dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi dan pendataan petani agar pupuk yang disalurkan sesuai dengan lahan yang digarap”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Desa Mattirowalie sudah cukup dan sangat baik dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi dan pendataan petani agar pupuk yang disalurkan sesuai dengan lahan yang digarap.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan Pimpinan Kios Lumut Blantara merupakan distributor, tentang sumber daya

Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Sumber daya pupuk bersubsidi selalu tersedia selama masa tanam yaitu dua kali dalam satu tahun yaitu pada masa tanam musim hujan dengan masa tanam musim kemarau dan pupuk yang selalu di subsidi yaitu UREA dan NPK”(hasil wawancara dengan bapak AL dan HH 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya pupuk bersubsidi selalu tersedia selama masa tanam dan ada dua kali masa tanam dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan dan pupuk yang selalu di subsidi yaitu UREA dan NPK

Tabel 4.1 Jumlah Pupuk Masa Tanam 1 Dan Masa Tanam 2

Masa Tanam	Jumlah Pupuk (kg)	
	UREA	NPK
Masa Tanam I	68.245	45.556
Masa Tanam II	68.245	45.556
Total	136.490	91.112

Sumber : Kios Lumut Belantara / Distributor, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpukan bahwa jumlah pupuk pada masa tanam I sama dengan masa tanam II jumlah pupuk UREA dan NPK sudah mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Ketua kelompok tani dan petani, tentang sumber daya Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“pupuk yang di yang di subsidi sudah sangat baik dalam segi harga persak sudah jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga pupuk yang non subsidi”(hasil wawancara dengan bapak SS dan SP 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa harga pupuk bersubsidi itu sudah sangat baik dikarenakan harga pupuk persak yang di subsidi jauh lebih murah dibandingkan dengan non subsidi

Tabel 4.2 HET Masa Tanam I dan Masa Tanam II

No	Nama Pupuk	HET
1	UREA	Rp. 112.500
2	NPK	Rp. 115.000

Sumber : Kios Lumut Belantara / Distributor, 2024

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa harga eceran tertinggi Pupuk Urea adalah Rp. 112.500,-/sak dan Pupuk NPK sebesar Rp. 115.000,-/sak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tentang sumber daya penyaluran pupuk bersubsidi sudah sangat cukup dan memadai sumber daya yaitu berupa pupuk bersubsidi selalu tersedia di masa tanam, dan harga dari pupuk yang terjangkau dan murah.

Tabel 4.3 Jumlah Lahan Dan Jumlah Pupuk Setiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah Lahan (Ha)	Jumlah Pupuk	
			UREA	NPK
1	Parenring	171.4	11.280	7.500
2	Cinekko	104.9	13.785	9.200
3	Bua	47.5	3.739	2.493
4	Limpo	70.4	9.294	6.202
5	Tille	155.5	20.787	13.881
6	Lappadare	69.3	9.360	6.280
Jumlah Total		619	68.245	45.556

Sumber : Kios Lumut Belantara / Distributor, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pupuk UREA yang digunakan lebih banyak dibandingkan pupuk NPK dan jumlah pupuk sudah sesuai dengan lahan yang digarap

### c. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Dalam melaksanakan kebijakan ini semua pihak terlibat yaitu kepala BPP, distributor, kelompok tani, dan petani untuk mencapai tujuan yang diinginkan”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan semua pihak terlibat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala BPP Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Sikap menerima atau menolak dari para agen pelaksana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil perumusan orang-orang yang terkait langsung dengan kebijakan tersebut. sangat paham dengan permasalahan dan permasalahan yang mereka alami”(hasil wawancara dengan bapak dan AL 5 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa menerima atau tidaknya pelaksana sebuah kebijakan dapat mempengaruhi

kinerja implementasi kebijakan, hal ini dapat terjadi jika kebijakan di laksanakan bukan hasil kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua kelompok tani Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan petani atau masyarakat, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang di inginkan penyaluran pupuk bersubsidi secara merata sesuai dengan tujuan dikarenakan kerjasama dari para pelaksana kebijakan”(hasil wawancara dengan bapak BK dan SP 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang di inginkan penyaluran pupuk bersubsidi secara merata sesuai dengan tujuan dikarenakan kerjasama dari para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua kelompok tani, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Melaksanakan kebijakan ini memang dari keinginan untuk membuat penyaluran pupuk bersubsidi itu merata dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”(hasil wawancara dengan bapak AM dan SS 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan memang dari keinginan untuk membuat penyaluran pupuk bersubsidi itu merata dan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak AM, AL, BK, AM, dan SS tentang disposisi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah

berjalan dengan baik di karenakan pelaksana kebijakan dikarnakan sikap menerima dari pelaksana kebjakan yaitu penyalur, kelompok tani, dan petani sebagai konsumen akhir sudah menjalan kan tugas dengan baik dengan bekerja sama.

Tabel 4.4 Jumlah kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani Perdusun

No	Nama Dusun	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1	Parenring	5	255
2	Cinekko	2	130
3	Bua	1	62
4	Limpo	2	98
5	Tille	3	180
6	Lappadare	2	82
Total		15	807

Sumber : Kepala BPP (Balai Penyuluh Pertanian), 2024

Berdasarkan table di atas dapat di simpulkan bahwa ada 15 kelompok tani dari setiap dusun di Desa Mattrirowalie dan setiap kelompok tani memiliki anggota kisaran 30 sampai 70an anggota dan total dari seluruh anggota kelompok tani yaitu 807 anggota.

### 3. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Mattirowalie dan Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru tentang struktur birokrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamaran Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Yang menjadi acuan norma dan pola dalam melaksanakan kebijakan yaitu SOP yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi. Pupuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang menjadi dasar penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.”(hasil wawancara dengan bapak AM dan AL 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi acuan dari kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu karakteristik atau SOP yang digunakan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak BK Ketua kelompok tani Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan SS petani atau masyarakat, tentang struktur birokrasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Saat pembagian pupuk bersubsidi itu sudah dilakukan sesuai dengan target yaitu petani yang bergabung dalam kelompok tani yang sudah sesuai dengan peraturan”(hasil wawancara penulis dengan bapak BK dan SS 5 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan baik dalam hal pemberian pupuk kepada petani yang bergabung dalam kelompok tani sesuai dengan peraturan

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ketua kelompok tani, tentang disposisi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“SOP yang digunakan sudah sesuai dengan target yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi”(hasil wawancara dengan bapak SM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa SOP yang digunakan sudah sesuai dengan target yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AM, SM dan AL tentang struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan baik dalam hal target penyaluran pupuk bersubsidi yaitu petani yang telah bergabung dengan kelompok tani dan pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang diinginkan dengan karakteristik atau SOP yang digunakan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi

## **2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

### **a. Faktor Pendukung**

Dalam sebuah kebijakan pasti ada berapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung begitu juga dengan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang faktor pendukung kebijakan

penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahawa ;

“faktor pendukung disaat penebusan pupuk bersubsidi jika ada petani yang belum bisa menebus pupuk di karenakan tidak memiliki cukup uang maka ketua kelompok tani akan menolong membayarkan dan akan di ganti setelah masa panen”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu faktor sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan kebijakan dimana untuk mendukung kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik maka di saat penebusan pupuk dimana ketua kelompok tani akan membantu menebus pupuk agar penebusan pupuk tidak akan terhambat

#### b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang faktor penghambat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahawa ;

“faktor penghambat terdapat pada saat pendataan seringkali terjadi beberapa masyarakat menambah lahan pertaniannya dan tidak melapor maka pupuk yang di dapat akan tidak sesuai dengan lahan yang di garap”(hasil wawancara dengan bapak AM 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu penghambat terdapat pada saat pendataan seringkali terjadi beberapa masyarakat menambah lahan pertaniannya dan tidak melapor maka pupuk yang di dapat akan tidak sesuai dengan lahan yang di garap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, tentang faktor penghambat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru bahwa ;

“Faktor penghambat yaitu penyesuaian terhadap kebutuhan jumlah pupuk dengan luas lahan, seringkali petani tidak melakukan pendataan saat menambah lahan garapan dan faktor perubahan jenis tanaman yang di tanam beda tanaman beda juga jumlah pupuk yang di gunakan”(hasil wawancara dengan bapak AL 5 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara penulis maka dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor penghambat yaitu faktor penyesuaian terhadap kebutuhan pupuk dengan luas lahan seringkali petani tidak melakukan pendataan saat menambah lahan garapan dan faktor perubahan jenis tanaman yang ditanam.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki kaitan dengan peneliti terdahulu Brillian Ar Rahman (2021) menemukan bahwa menggunakan teori yang sama yaitu teori Goerge C. Edward III hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada beberpa hambatan. Hal ini sejalan dengan penelitian saya dimana masih ada beberapa kendala pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi yang di temukan. Kemudian peneliti Nabila (2023) memukan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal dan masih adanya beberapa hambatan.

Hal ini sejalan dengan penelitian saya dimana masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi yang di temukan.

Dengan demikian, peneliti terdahulu tersebut berkaitan dengan peneliti ini karena memiliki persoalan atau fokus penelitian yang serupa mengenai penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi. Temuan-temuan peneliti terdahulu tersebut dapat menjadi pembandingan atau landasan dari hasil yang di dapatkan oleh peneliti.

Berdasarkan pada hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dalam observasi yang peneliti lakukan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru melihat penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP.

Dari hasil wawancara terhadap kepala desa, kepala BPP, distributor, ketua kelompok tani, dan petani sesuai dengan hasil penelitian yang ada mengetahui bahwa bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru itu berjalan dengan cukup baik, dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah bagus. Dari segi komunikasi dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi itu dilakukan dengan cukup baik saat melakukan pendataan, dari segi sumber daya sudah sangat memadai sumber daya manusianya sangat kompeten dalam menjalankan tugas dan sumber daya non manusia berupa pupuk selalu tersedia tepat waktu, dari segi disposisi pelaksana kebijakan sudah menerima dan menjalankan tugas dengan baik, dan dari segi struktur birokrasi yaitu SOP yang digunakan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi. Pupuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang

menjadi dasar penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019 pasal 5 yang berbunyi.

- 1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- 2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK sebagai berikut:
  - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
  - c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam
- 3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau I perusahaan perikanan budi daya.

Selain bagaimana implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi terdapat juga faktor-faktor yang dapat mendukung dan menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi pendukung yaitu sumber daya manusianya yang kompeten dalam melaksanakan implementasi

kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi dan penghambat yaitu penyesuaian kebutuhan jumlah pupuk dengan luas lahan.

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru di jalankan dengan baik sesuai dengan SOP dalam proses pelaksanaan kebijakan meliputi dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru di lakukan melalui tahapan yang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan tujuan kesejahteraan petani implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan.

sesuai dengan teori implementasi kebijakan (Goerge C. Edward III 2009) sebagai landasan dalam penelitian adapun sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Goerge C. Edward III salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi (Nugroho 2011). Implementasi kebijakan akan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh para individu yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan dengan tepat kepada para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman ukuran dan tujuan dasar perlu dikomunikasikan agar para pelaksana mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan secara pasti. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan proses

yang sangat kompleks dan rumit. Selain itu, sumber informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda.

Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, maka pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu keputusan harus mengetahui apakah mereka mampu melakukannya. Padahal, implementasi kebijakan harus dapat diterima oleh semua pelaksana dan harus memahami dengan jelas dan tepat maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Jika pelaksana kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan, maka mereka tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Kurangnya komunikasi kepada pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru peneliti akan menjelaskan bagaimana komunikasi antara para pelaksana implementasi kebijakan.

Proses penyampaian informasi tentang kebijakan dilakukan oleh pemerintah kepada pelaksana kebijakan yaitu kelompok tani dan petani sebagai kelompok sasaran dengan cara diadakannya pertemuan berupa musyawarah atau rapat sekaligus untuk meminta pendapat kepada masyarakat agar pengimplementasian kebijakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Dilihat dari pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi itu sudah baik dikarenakan pelaksana menjalankan tugas dengan baik, dari segi komunikasi yaitu komunikasi antara distributor dengan kelompok tani

sebagai konsumen akhir itu sudah sangat baik meski masih ada sedikit miss komunikasi saat pendataan dalam penyesuaian lahan yang di garap dengan jumlah pupuk karena jika petani menambah lahan yang digarap saat pendataan telah di lakukan maka jumlah pupuk yang di dapatkan akan tidak sesuai dengan lahan yang di garap dan pemupukan terhadap lahan garapan tidak akan maksimal dan tidak merata.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena betapapun jelas dan konsistennya ketentuan atau aturan suatu kebijakan, apabila personel yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. (Tahir 2015)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kompeten. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebab tanpa sumberdaya manusia yang handal maka implementasi akan berjalan lambat, oleh karena itu implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupate Barru membutuhkan sumber daya manusia yang kopeten Sumber daya manusia yang di maksud dalam penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yaitu distributor atau penyalur pupuk bersubsidi, kelompok petani dan petani sebagai konsumen akhir untuk

melaksanakan implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa mencapai tujuan yang di inginkan

Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber daya merupakan hal yang penting dalam pengimplementasian kebijakan pupuk bersubsidi dan sumber daya yang penting juga adalah sumber daya non manusia berupa pupuk bersubsidi yang sangat di butuhkan petani

Dalam penyaluran sumber daya berupa pupuk bersubsidi ada dua macam pupuk yang di subsidikan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru untuk mendukung proses produksi pertanian yaitu pupuk UREA dan NPK masing masing akan di bagikan saat masa tanam tiba, masa tanam yang dilakukan dua kali dalam setahun masa tanam padi pertama pada bulan januari masa tanam kedua juni pada masa saat musim hujan.

#### c. Disposisi

Menurut George C. Edward III disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu hal yang penting jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif maka pelaksana kebijakan harus tau apa yang harus di lakukan (Winarno 2008).

Kecendrungan dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang memiliki konsekuensi. Jika para pelaksanan bersikap abaik terhadap suatu kebijakan hal ini berarti adanya dukungan yang dapat membuat suatu kebijakan mencapai tujuan yang di inginkan. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai yang

di sepakati. Oleh karena itu di lakukan komunikasi antara pemerintah dan pelaksana kebijakan berupa musyawarah atau rapat agar mencapai kesepakatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa implementor atau pelaksana implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru itu sudah sangat baik di karenakan para implementor saling bekerja sama dalam menjalankan kebijakan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan itu ada di karenakan adanya komitmen dari para pelaksana semangat para pelaksana mencapai keberhasilan untuk mendorong penyaluran pupuk bersubsidi hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu Brillian Ar Rahman (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Biling System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) hasil penelitian menemukan bahwa Disposisi, komitmen, watak para pelaksana dalam merespon program untuk mencapai sasaran keberhasilan program sudah baik karena semangat dan kemauan.

Disposisi

#### d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi

ini mencakup dua hal, yaitu mekanisme dan struktur organisasi. (Nugroho 2011)

Mekanisme dalam implementasi kebijakan sudah membuat SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan sasaran kebijakan struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah tersedia oleh pemerintah pusat

Implementasi suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat prosedur operasional standar sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan secara sistematis. Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru telah di atur dalam prosedur SOP.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru telah di atur prosedur pelaksanaannya *standar operating prosedur* (SOP) sangat di butuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan yang di jelas oleh informan SOP yang di gunakan struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan baik dalam hal terget penyaluran pupuk bersubsidi yaitu petani yang telah bergabung dengan kelompok tani dan pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang di inginkan dengan karakteristik atau SOP yang digunakan pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Bersubsidi Pasal 5 yang berbunyi

- 1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- 2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RDKK sebagai berikut:
  - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
  - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
  - c. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor perikanan budi daya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam
- 3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau I perusahaan perikanan budi daya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan model implementasi Goerge C Edward III, karena keempat variabel tersebut komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam hal ini peneliti ingin melihat peran faktor tersebut dalam implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi :

1. Komunikasi

Komunikasi berdasarkan tujuan dari kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi yakni penyaluran pupuk secara merata, sudah cukup baik komunikasi antara pelaksana kebijakan yakni distributor dan kelompok cukup baik namun masih ada sedikit miss dalam komunikasi

2. Sumber Daya

Sumber daya berupa pelaksana kebijakan yang kompeten dan saling bekerja sama dan berupa keretsedian pupuk bersubsidi yang dibagikan secara merata.

3. Disposisi

Desposisi komitmen dari para pelaksanaan kebijakan distributor dan kelompok tani yang menerima dan menjalankan tugas dengan baik dalam penyaluran pupuk subsidi yang merata dan sesuai dengan lahan garapan untuk mendorong keberhasilan dari implenetasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi

4. Struktur birokrasi, yaitu karakteristik, SOP (Standard Operating Procedures) norma-norma, dan pola-pola dalam menjalankan kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi ini, pemerintah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, saran yang ingin di sampaikan penulis dalam penelitian ini untuk.

### 1) Pemerintah Desa

Diharapkan pemerintah desa meningkatkan koordinasi antara Kepala desa, Balai penyuluh pertanian, distributor, kelompok tani, dan petani dengan memfasilitasi berupa pertemuan musyawarah atau rapat .

### 2) Kelompok tani

Diharapkan kelompok tani agar bisa meningkatka koordinasi dengan distributor agar padataat pendataan tidak terjadi miss komunikasi

### 3) Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik).
- Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Afabeta, Bandung.
- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Arifin, Tahir. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alvabeta, cv.
- Augina Mekarisce, Arnild. 2020. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat.
- Ghony, M Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif\_dalam\_Bidan. Jurnal Fokus Konseling,2(2),144159.<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika. Jakarta.
- Ikbal. (2017). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Didesa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.
- Lestari, O., & Wijayanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani Oni. Journal of Political Issues.
- Maharani, N. P. (2018). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur.
- Meutia, I. F. 2017. Analisis Kebijakan Publik (M. Nizar (Ed.)). CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung.
- Mulyadi. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta.
- Nabila. (2023). Implementasi Kebijakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Petani Berjaya (Studi di Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).
- Nugroho, R. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nurchayanto, H. (2016). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo, Jakarta.
- Rahmaan, B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Melalui Biling System (Studi di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu).
- Ramadhani, A., & Ramadhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Samiri, M. (2019). *Analisis Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan (Teori dan Praktik)*.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi*. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). Implementasi Kebijakan (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi).
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta; Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Med Press.gg



# LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumentasi



Foto tampak depan Kantor Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kabupaten Barru



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa (Drs. H. Alimuddin)



Wawancara dengan Kepala BPP Balai Penyuluh Pertanian  
(Alimuddin, SP)



Wawancara dengan Pimpinan Kios Lumut Belantara Distributor  
(Hasbullah Hanan)



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani  
(Bakri)



Wawancara dengan Petani  
(Sapuddin Supu)

## Lampiran 2 Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 19368/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Barru
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4564/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

N a m a	: IRFAN
Nomor Pokok	: 105611101320
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauaddin No. 259, Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI DESA MATTIROWALIE  
 KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juli s/d 24 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 21 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal;

### Lampiran 3 Izin/Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru  
<http://izinonline.barrukah.go.id> - e-mail : [barrudpmpstpk@gmail.com](mailto:barrudpmpstpk@gmail.com) Kode Pos 90711

Barru, 25 Juli 2024

<p>Nomor : 424/IP/DPMPSTP/VII/2024          Lampiran : -          Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian</p>	<p>Kepada          Yth. Kepala Desa Mattirowalie          di-          Tempat</p>
---	---

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SulSel Nomor : 19368/S.01/PTSP/2024 tanggal, 21 Juli 2024 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa di bawah ini:

**Nama** : Irfan  
**Nomor Pokok** : 105611101320  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Muhammadiyah Makassar  
**Pekerjaan/Lembaga** : Mahasiswa  
**Alamat** : Parenging Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 26 Juli 2024 s/d 24 September 2024, dalam rangka penyusunan Skrripsi, dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEBLIKAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIJAJA KABUPATEN BARRU**

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyebarkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.  
 Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



**Kepala Dinas,**  
**ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.M.SI**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 19770829 199612 1 001

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan),
2. Kepala Bappeltbangda Kab. Barru,
3. Camat Tanete Riaja Kab. Barru,
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar,



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Akmal kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : IRFAN

Nim : 105611101320

Program Studi : Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 02 Oktober 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Sulastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 1964 09 01 964 591

# IRFAN 105611101320 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Oct-2024 08:39AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2471006407  
File name: BAB\_I\_-\_2024-10-01T083810.734.docx (26.92K)  
Word count: 1671  
Character count: 11464

## IRFAN 105611101320 Bab I

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://eprints.unm.ac.id">eprints.unm.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://posmeranti.blogspot.com">posmeranti.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
5	Angga Prabowo, Guruh Putro Dirgantoro. "Pengelompokan Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Bojonegoro Menggunakan Metode K -Means Clustering", Multidisciplinary Applications of Quantum Information Science (Al-Mantiq), 2023 Publication	<1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

# IRFAN 105611101320 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Oct-2024 08:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2471007547

File name: BAB\_II\_-\_2024-10-01T083810.778.docx (104.33K)

Word count: 5490

Character count: 37736

## IRFAN 105611101320 Bab II

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

5%

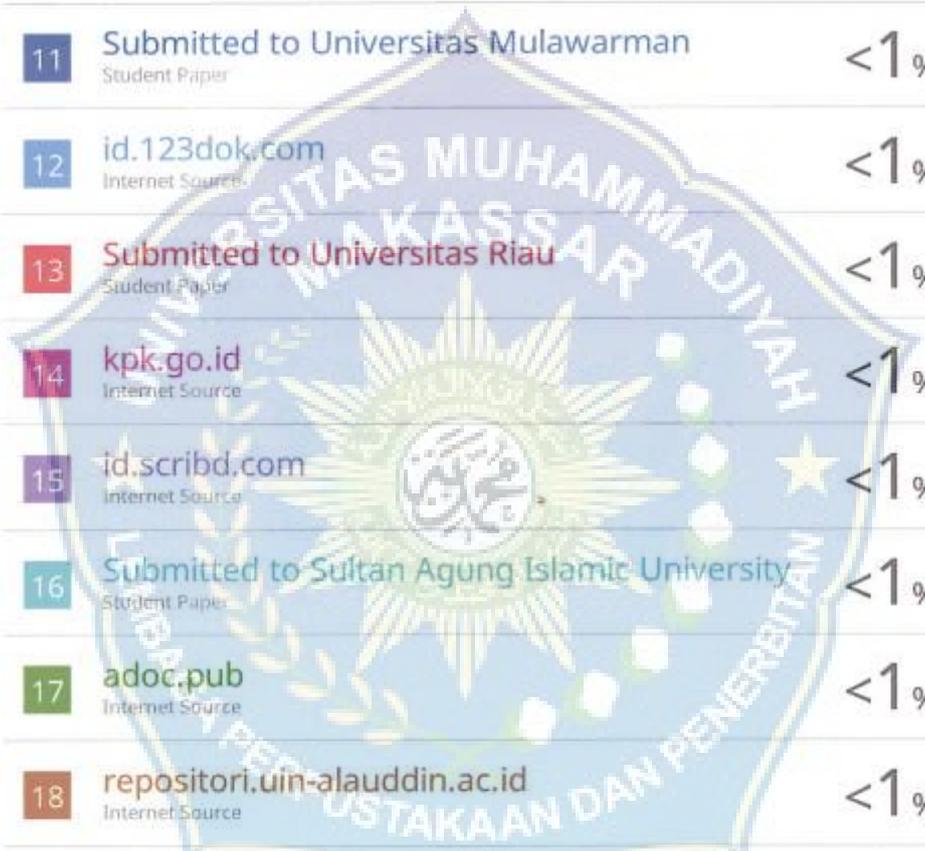
PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	9%
2	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	5%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	Wardati Wardati, Zulmasyhur Zulmasyhur, Susanti Susanti, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT", JURNAL SOSIAL HUMANIORA, 2020 Publication	1%
5	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	1%
6	<a href="http://repo.apmd.ac.id">repo.apmd.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%



8	123dok.com Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Jambi Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
11	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1%
12	id.123dok.com Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1%
14	kpk.go.id Internet Source	<1%
15	id.scribd.com Internet Source	<1%
16	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
17	adoc.pub Internet Source	<1%
18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
19	Sadam Husen, Rita Rahmawati, Denny Hernawan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	<1%

PEMANFAATAN PARIWISATA TAMAN  
NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU  
SENTARUM (TNBKDS) KALIMANTAN BARAT",  
Jurnal Governansi, 2018

Publication

20	<a href="http://www.bernas.id">www.bernas.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Garden Grove Unified School District Student Paper	<1 %
22	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://repository.ump.ac.id">repository.ump.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id">jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</a> Internet Source	

&lt;1%

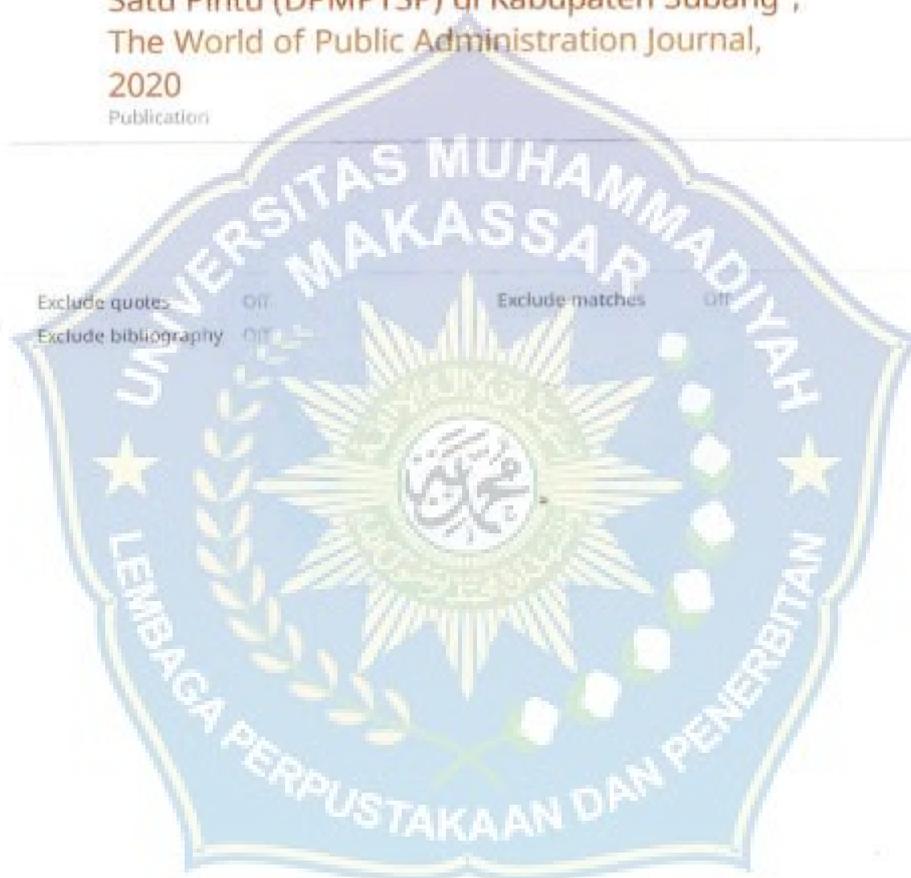
- 30 Iwan Henri Kusnadi, Muhammad Rifqi Baihaqi. "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang", *The World of Public Administration Journal*, 2020  
Publication

&lt;1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



# IRFAN 105611101320 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Oct-2024 08:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2471031417

File name: BAB\_III\_-\_2024-10-01T083810.693.docx (24,61K)

Word count: 927

Character count: 6374

## IRFAN 105611101320 Bab III

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan  
Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

7%

2

docplayer.info

Internet Source

2%

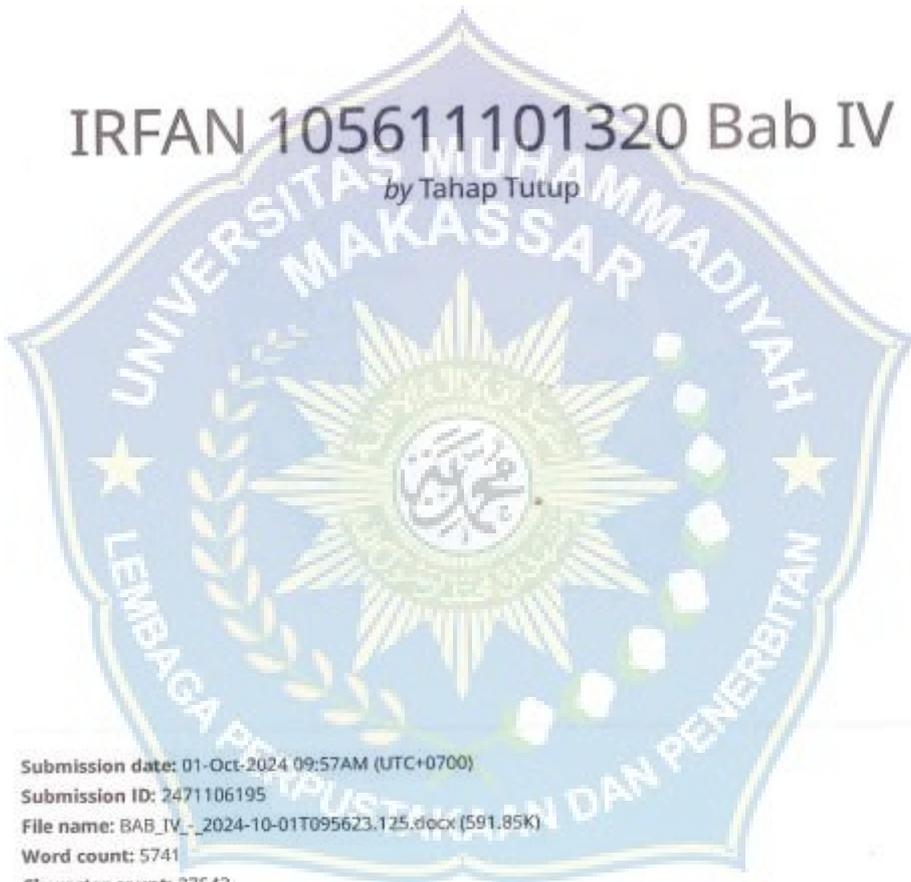
Exclude quotes Exclude bibliography 

Exclude matches &lt; 2%



# IRFAN 105611101320 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Oct-2024 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2471106195

File name: BAB\_IV\_-\_2024-10-01T095623.125.docx (591.85K)

Word count: 5741

Character count: 37543

## IRFAN 105611101320 Bab IV

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://psp.pertanian.go.id">psp.pertanian.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://lakonjaputraarsy.blogspot.com">lakonjaputraarsy.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
5	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
6	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to Garden Grove Unified School District Student Paper	<1%
8	<a href="http://jia.stialanbandung.ac.id">jia.stialanbandung.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://journals.ums.ac.id">journals.ums.ac.id</a> Internet Source	<1%

10	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="https://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://www.dgraft.com">www.dgraft.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://ejournal3.undip.ac.id">ejournal3.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://library.binus.ac.id">library.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://neefya.blogspot.com">neefya.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://static.banyumaskab.go.id">static.banyumaskab.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  Off      Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  Off

# IRFAN 105611101320 Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 01-Oct-2024 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2471040026

File name: BAB\_V\_-\_2024-10-01T083810.756.docx (21.89K)

Word count: 539

Character count: 3585

## IRFAN 105611101320 Bab V

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to School of Business and  
Management ITB

Student Paper

2%

2

id.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



## RIWAYAT HIDUP



**Irfan**, lahir di Tobakung, pada tanggal 04 Oktober 2002. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara hasil buah cinta dari Bapak Makmur dan Ibu Nur Lina. Mulai memasuki jenjang Pendidikan formal di SD Negeri Parenreng dan tamat pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tanete Riaja pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi pada tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Barru pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020. Atas Ridha Allah swt. Dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2024 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “**Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.**”